

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dian Febrinal¹, Septia Irnanda Saputra², Hermen Irawadi³, Sri Rahmi⁴, Nuraiman⁵

^{1, 2, 3}UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Jl. Jenderal Sudirman No.137, Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia

⁴UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jl. Syech Abdurrauf, Banda Aceh, Aceh, Indoensia

⁵STKIP Ahlussunnah Bukittinggi, Jl. Diponegoro No.8, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indoensia

Email: dian130112@gmail.com

Article History

Received: 21-10-2024

Revision: 06-11-2024

Accepted: 08-11-2024

Published: 09-11-2024

Abstract. This research aims to analyze the role of social media in influencing education policy in the digital era. This research uses a mixed approach, namely qualitative and quantitative, involving 300 respondents from various stakeholders, including students, parents, educators, and government officials. The data collection techniques that will be used in this research include surveys, interviews, and content analysis. The analysis used in this research employs SPSS for descriptive data and thematic analysis methods for interview results. The research results show that social media serves as an effective tool in disseminating information related to education policies, with 89% of respondents agreeing with this. Additionally, 70% of respondents stated that social media facilitates public participation in the education policy-making process. There is doubt about the extent to which input from social media is considered by policymakers, with 40% of respondents expressing skepticism about this. An analysis of the content of 300 posts related to education policy revealed that issues such as educational gaps, curriculum, and access to technology in online learning are top concerns for the community, with 75% of posts showing negative sentiment towards existing education policies. These findings show the importance of increasing digital literacy and creating a more inclusive mechanism so that people's voices on social media are more accommodated in policymaking.

Keywords: Social Media, Education Policy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam memengaruhi kebijakan pendidikan di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini melibatkan 300 responden dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, pendidik, dan pejabat pemerintah. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup survei, wawancara, dan analisis konten. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS untuk data deskriptif dan menggunakan metode analisis tematik untuk hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan pendidikan, dengan 89% responden sepakat akan hal ini. Selain itu, 70% responden menyatakan bahwa media sosial memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan. Terdapat keraguan terhadap sejauh mana masukan dari media sosial dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, dengan 40% responden meragukan hal tersebut. Analisis konten dari 300 postingan terkait kebijakan pendidikan mengungkapkan bahwa isu-isu seperti kesenjangan pendidikan, kurikulum, dan akses teknologi dalam pembelajaran daring menjadi perhatian utama masyarakat, dengan 75% postingan menunjukkan sentimen negatif terhadap kebijakan pendidikan yang ada. Temuan ini menunjukkan pentingnya pentingnya meningkatkan literasi digital dan menciptakan mekanisme yang lebih inklusif agar suara masyarakat di media sosial lebih diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

Kata Kunci: Media Sosial, Kebijakan Pendidikan

How to Cite: Febrinal, D., Saputra, S. I., Irawadi, H., Rahmi, S., & Nuraiman. (2024). Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (6), 6753-6763. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2019>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi dan memperoleh informasi. Dalam dua dekade terakhir, kita telah menyaksikan revolusi digital yang signifikan, di mana internet dan perangkat mobile menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Menurut laporan *We Are Social* pada Koran Tempo (Jumat, 17 Maret 2023) dengan konteks (“Penggunaan Internet Global Capai 5,16 Miliar Orang,” 2023), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Angka ini mencapai 77% dari jumlah penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi *platform* utama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi, termasuk dalam konteks pendidikan. Pertumbuhan pengguna media sosial yang pesat ini juga memengaruhi cara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat berinteraksi. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk mengadvokasi isu-isu penting, termasuk kebijakan pendidikan. Penelitian Rahman et al., (2023) menunjukkan bahwa sekitar 53% pengguna media sosial mengaku mengikuti akun-akun yang berkaitan dengan pendidikan, yang menunjukkan betapa relevannya media sosial dalam konteks ini. Dengan adanya platform tersebut, suara masyarakat, terutama para siswa dan orang tua, dapat lebih mudah didengar oleh pengambil keputusan.

Relevansi media sosial dalam konteks pendidikan tidak dapat dipandang sebelah mata. Media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi yang efisien, memungkinkan pertukaran ide dan informasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan. Misalnya, kampanye online yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menuntut perubahan pembiayaan kuliah atau yang disebut dengan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tidak relevan dengan riwayat pekerjaan orang tua. Dalam kasus tertentu, seperti hastag tentang nasib guru yang gajinya jauh di bawah UMR (Upah Minimum Regional) meminta kebijakan pemerintah berkaitan dengan keadilan sosial dan kesetaraan dan juga telah diteliti oleh (Kulsum, 2023). Namun, di balik potensi positifnya, media sosial juga memiliki tantangan tersendiri. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat menimbulkan kebingungan dan konflik di antara pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan secara efektif untuk memengaruhi kebijakan pendidikan dengan cara yang konstruktif dan produktif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran media sosial dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Dalam era digital ini, media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi platform untuk advokasi dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Dengan memahami bagaimana media sosial beroperasi dalam konteks pendidikan, kita

dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memanfaatkan platform ini dalam memengaruhi kebijakan yang lebih baik. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jaringan sosial. Menurut Kaplan & Haenlein (2010), media sosial adalah "seperangkat aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi *Web 2.0*, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna." Karakteristik utama media sosial mencakup interaktivitas, keterhubungan, dan kemampuan untuk menyebarluaskan informasi dengan cepat. Dalam konteks pendidikan, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi dan pembelajaran yang dapat diakses oleh semua kalangan.

Terdapat berbagai jenis media sosial yang relevan dalam dunia pendidikan, antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Facebook, misalnya, digunakan oleh institusi pendidikan untuk membangun komunitas dan menyebarkan informasi terkait kegiatan akademik. Twitter, dengan karakteristiknya yang ringkas, sering digunakan untuk berbagi berita terkini dan informasi penting dengan cepat. Instagram, di sisi lain, lebih berfokus pada visualisasi, yang dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian siswa dan orang tua terhadap program-program pendidikan. LinkedIn, sebagai platform profesional, menyediakan ruang bagi para pendidik dan profesional pendidikan untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Menurut Auliya et al., (2023) sekitar 72% remaja menggunakan setidaknya satu platform media sosial, yang menunjukkan potensi besar media sosial dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa.

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, pendanaan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Menurut Tawa (2019), kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses yang adil bagi semua siswa. Hal ini mencakup penetapan standar pendidikan, pengembangan program pelatihan untuk guru, serta pengalokasian anggaran untuk fasilitas pendidikan.

METODE

Dalam mengkaji pengaruh media sosial terhadap kebijakan pendidikan, pendekatan kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki justifikasi yang kuat. Menggunakan kedua pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika media sosial dan kebijakan pendidikan. Penelitian kualitatif

memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, pengalaman, dan perspektif individu terkait penggunaan media sosial dalam advokasi pendidikan. Misalnya, menurut Latifah & Najicha (2022) menyatakan bahwa pemahaman individu terhadap teknologi, termasuk media sosial, sangat mempengaruhi bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam dapat menawarkan wawasan yang penting tentang batasan dan potensi media sosial dari sudut pandang individu.

Di sisi lain, pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis data statistik yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengaruh media sosial. Sebagai contoh, penelitian oleh Andriyendi et al., (2023) menunjukkan bahwa pengguna media sosial, terutama dalam konteks pendidikan, memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam aktivitas politik, yang mencakup advokasi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Dengan data survei yang dikumpulkan, penelitian ini dapat mengungkapkan hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat partisipasi publik dalam advokasi kebijakan pendidikan. Penggunaan analisis konten juga sangat relevan dalam penelitian ini, terutama dalam menilai narasi dan diskusi yang terjadi di media sosial terkait kebijakan pendidikan. Sebuah studi oleh Makhshun & Khalilurrahman (2018) mengemukakan bahwa analisis konten media sosial dapat membantu peneliti memahami sikap publik dan kecenderungan yang muncul dalam diskusi terkait kebijakan pendidikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tindakan pemerintah.

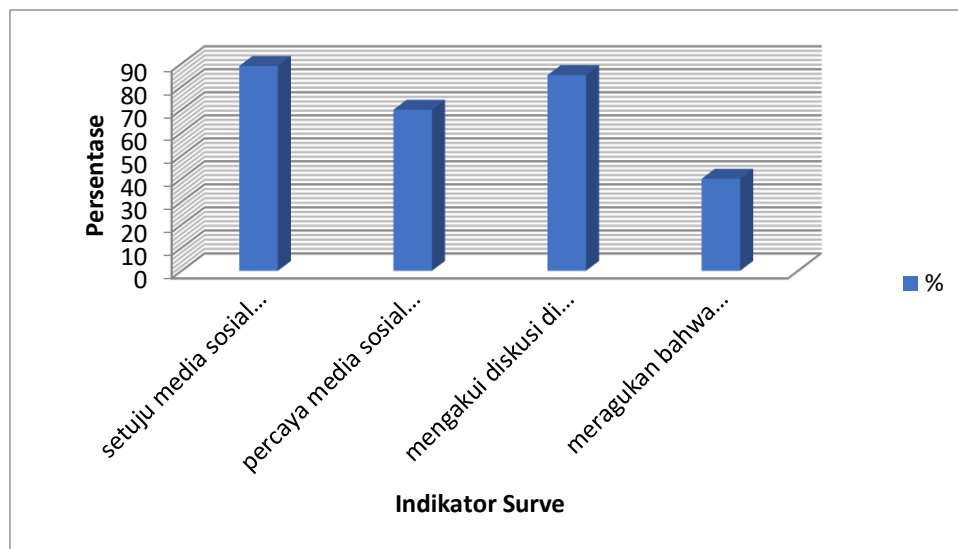
Melalui kombinasi pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran media sosial dalam pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam advokasi pendidikan, ini tentunya dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan suara masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup survei, wawancara, dan analisis konten. Survei akan dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, pendidik, dan pejabat pemerintah. Dengan menggunakan kuesioner yang dirancang secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi dan sikap mereka terhadap peran media sosial dalam kebijakan pendidikan.

Wawancara mendalam juga akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya mengenai pengalaman individu dalam menggunakan media sosial untuk memengaruhi kebijakan pendidikan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali cerita-cerita pribadi

yang mungkin tidak terungkap dalam survei, memberikan konteks yang lebih dalam mengenai bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat advokasi. Analisis konten akan dilakukan terhadap berbagai postingan di media sosial yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Dengan menganalisis konten yang diposting oleh pengguna media sosial, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama, sentimen, dan pola yang muncul dalam diskusi mengenai kebijakan pendidikan. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana isu-isu pendidikan dibahas dan dipengaruhi oleh media sosial. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS untuk data deskriptif dan menggunakan metode analisis tematik untuk hasil wawancara. Peneliti akan melakukan transkripsi terhadap hasil wawancara dan kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi peserta. Ini akan membantu dalam menemukan pola-pola penting yang menggambarkan pengalaman individu dalam menggunakan media sosial untuk advokasi pendidikan.

HASIL

Penelitian ini melibatkan 300 responden yang terdiri dari siswa (30%), orang tua (25%), pendidik (25%), dan pejabat pemerintah (20%). Survei dilakukan untuk mengukur persepsi mereka terhadap peran media sosial dalam memengaruhi kebijakan pendidikan. Hasil survei menunjukkan:



Gambar 1. Persepsi responden terhadap peran media sosial

Media sosial telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kebijakan pendidikan. Sebuah survei menunjukkan bahwa 89% responden setuju bahwa platform-platform ini berperan penting dalam menyebarkan informasi

dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi yang memicu diskusi dan refleksi di kalangan masyarakat. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi, masyarakat menjadi lebih teredukasi dan mampu menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan yang mempengaruhi pendidikan. Selain itu, 70% responden menyatakan bahwa media sosial memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, mengindikasikan bahwa platform ini memberikan ruang bagi suara-suara yang sebelumnya mungkin tidak terdengar.

Namun, meskipun banyak responden yang mengakui pengaruh positif dari media sosial, terdapat keraguan yang signifikan mengenai sejauh mana pemerintah memperhatikan masukan yang datang dari platform tersebut. Sekitar 40% responden meragukan bahwa masukan yang disampaikan melalui media sosial benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas media sosial sebagai alat advokasi. Diskusi yang terjadi di media sosial, yang diakui oleh 85% responden mempengaruhi pandangan mereka tentang kebijakan pendidikan, mungkin tidak selalu berujung pada perubahan kebijakan yang konkret. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi masyarakat dan respons pemerintah, yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat melalui media sosial, agar dapat menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih responsif dan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 18 responden dari berbagai pemangku kepentingan seperti (siswa, guru, orang tua, dan pejabat pendidikan) di Sumatera Barat. Berikut adalah beberapa temuan dari segi siswa, masih banyak siswa yang merasa bahwa media sosial menjadi platform yang membantu mereka menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu pendidikan, tetapi mereka merasa suara mereka sering diabaikan oleh pihak berwenang. Dari pihak Guru, sebagian besar guru setuju bahwa media sosial telah menjadi tempat diskusi yang produktif, tetapi ada kekhawatiran terkait informasi yang salah atau kurangnya kejelasan dalam topik-topik tertentu. Dari segi Orang tua, beberapa orang tua menyatakan bahwa media sosial memberi mereka informasi yang lebih mudah diakses tentang kebijakan pendidikan, tetapi mereka merasa sulit untuk membedakan antara informasi yang akurat dan yang salah. Dari segi pejabat pemerintah, mereka mengakui bahwa media sosial sering mencerminkan keprihatinan

masyarakat, tetapi proses formal dalam pembuatan kebijakan tetap menjadi prioritas, sehingga tidak semua masukan dari media sosial dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil analisis konten yang mendalam, penelitian ini menganalisis kurang lebih 300 postingan terkait kebijakan pendidikan di berbagai platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan Threads, selama periode empat bulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan saat ini. Dari analisis konten tersebut, ditemukan bahwa kesenjangan pendidikan, kurikulum, dan akses teknologi dalam pembelajaran jarak jauh merupakan topik yang paling sering dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap isu-isu yang mempengaruhi kualitas pendidikan, terutama di masa transisi menuju pembelajaran daring yang semakin umum.

Lebih lanjut, sebanyak 75% dari total postingan menunjukkan sentimen negatif terhadap kebijakan pendidikan yang sedang berlaku, sementara hanya 20% yang menunjukkan sentimen positif, dan 5% sisanya bersifat netral. Angka-angka ini mencerminkan ketidakpuasan yang signifikan di kalangan masyarakat terkait implementasi kebijakan pendidikan saat ini. Pola diskusi di media sosial sering dipicu oleh berita atau peristiwa tertentu, seperti pengumuman kebijakan baru atau isu kontroversial di bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai platform penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Dengan demikian, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memperhatikan suara masyarakat yang muncul di ruang digital ini, agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

DISKUSI

Dalam pembahasan hasil penelitian mengenai peran media sosial dalam memengaruhi kebijakan pendidikan, beberapa poin penting dapat diangkat, yaitu pengaruh positif media sosial dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa masukan masyarakat melalui media sosial benar-benar dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. Hasil survei menunjukkan bahwa 89% responden sepakat bahwa media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan pendidikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Threads, telah menjadi sumber utama informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Literasi informasi yang meningkat di kalangan masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam diskusi mengenai kebijakan pendidikan. Penelitian lain yang mendukung temuan ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kemampuan untuk mempercepat diseminasi informasi, menghubungkan

masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke sumber informasi tradisional (Yusuf et al., 2023).

Sekitar 70% responden menyatakan bahwa media sosial memfasilitasi partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya sebagai alat informasi, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas. Fakta bahwa platform ini memungkinkan individu dan kelompok yang mungkin tidak memiliki akses ke jalur formal, untuk menyuarakan pendapat mereka, memperkuat argumen tentang potensi media sosial sebagai alat demokrasi yang lebih inklusif (Nuraeni et al., 2024). Namun, temuan ini juga mengungkapkan bahwa ada kesenjangan yang signifikan antara partisipasi masyarakat dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap masukan yang berasal dari media sosial, sebagaimana diakui oleh 40% responden yang meragukan masukan mereka dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Temuan bahwa 85% responden merasa pandangan mereka terhadap kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh diskusi yang terjadi di media sosial menyoroti peran penting platform ini dalam membentuk opini publik. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara perubahan pandangan publik dan penerapan kebijakan konkret. Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun media sosial dapat meningkatkan kesadaran dan diskusi, efektivitasnya sebagai alat advokasi untuk perubahan kebijakan masih terbatas. Kesenjangan antara suara masyarakat dan respons pemerintah menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme formal yang memungkinkan masukan dari media sosial lebih terintegrasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Meskipun media sosial menawarkan akses yang lebih mudah terhadap informasi kebijakan, sebagian orang tua dan guru khawatir mengenai akurasi informasi yang beredar. Penelitian ini menemukan bahwa orang tua dan guru merasa kesulitan dalam membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak. Hal ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa informasi yang beredar di media sosial sering kali rentan terhadap misinformasi, terutama dalam topik-topik yang kompleks seperti kebijakan pendidikan (Kusrini et al., 2023). Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan literasi digital dan informasi masyarakat agar mereka lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima di platform ini.

Hasil wawancara dengan pejabat pemerintah mengungkapkan bahwa meskipun media sosial sering kali mencerminkan keprihatinan masyarakat, proses formal dalam pembuatan kebijakan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial mungkin tidak cukup kuat untuk secara langsung memengaruhi kebijakan, tetapi lebih berperan sebagai

cerminan sentimen publik yang perlu diakomodasi dalam proses formal. Untuk meningkatkan efektivitas masukan dari masyarakat, penting bagi pemerintah untuk membangun mekanisme yang lebih terbuka dalam mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat yang disuarakan melalui media sosial. Dari analisis konten 300 postingan media sosial, ditemukan bahwa kesenjangan pendidikan, kurikulum, dan akses teknologi dalam pembelajaran daring menjadi isu yang paling sering dibahas. Tingginya sentimen negatif (75%) terhadap kebijakan pendidikan yang ada mengindikasikan bahwa masyarakat tidak puas dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Fakta bahwa diskusi dipicu oleh berita atau kebijakan baru menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai saluran penting untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak populer atau kontroversial. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya para pembuat kebijakan untuk memperhatikan dinamika opini publik di media sosial sebagai dasar dalam mengkaji kembali atau memperbaiki kebijakan yang telah diterapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran penting media sosial dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Media sosial telah menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi dan mendorong diskusi terkait isu-isu kebijakan pendidikan. Namun, meskipun platform ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, terdapat kesenjangan yang signifikan antara partisipasi masyarakat dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap masukan yang disampaikan melalui media sosial. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu membangun mekanisme yang lebih responsif dan inklusif dalam mendengarkan serta mempertimbangkan suara masyarakat yang disuarakan di media sosial. Selain itu, tantangan dalam mengatasi misinformasi yang sering beredar di platform ini juga perlu mendapat perhatian serius. Dengan meningkatkan literasi digital dan memperkuat keterlibatan masyarakat, media sosial dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan pendidikan yang lebih baik dan inklusif.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat peran media sosial dalam memengaruhi kebijakan pendidikan yaitu penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program literasi digital yang komprehensif, baik bagi siswa, orang tua, maupun pendidik. Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat membedakan antara informasi yang akurat dan yang salah,

sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi kebijakan pendidikan dengan lebih bijaksana. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dan transparan untuk menampung masukan masyarakat dari media sosial. Dan juga pemerintah perlu mensosialisaikan bagaimana cara bermedia sosial dengan baik dan benar di lingkungan Pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik yang lebih aktif, serta penggunaan alat digital seperti platform survei online yang mengintegrasikan diskusi di media sosial dengan proses pengambilan keputusan kebijakan. Mengingat bahwa siswa adalah salah satu kelompok utama yang terpengaruh oleh kebijakan pendidikan, mereka harus lebih dilibatkan dalam diskusi kebijakan. Media sosial dapat menjadi sarana yang tepat untuk mendengar aspirasi siswa dan memungkinkan mereka memberikan masukan yang berharga terkait kebijakan yang memengaruhi pendidikan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, terutama kepada siswa, orang tua, pendidik, dan pejabat pemerintah yang telah memberikan waktu, pandangan, serta pengalaman mereka yang sangat berharga. Tanpa kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan ini, penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada tim peneliti dan asisten lapangan yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan data dan menganalisis hasil penelitian ini. Semoga temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyendi, D. O., S. Nu., & Dewi, S. F. (2023). Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 101(1), 2798–6020.
- Auliya, A. A., Yahya, A. B., & Hurryos, F. K. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Remaja di Indonesia. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i1.297>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kulsum, U. (2023). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap. *Journal on Education*, 06(01), 8894–8912. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4374> <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4374/3569>
- Kusrini, E., Munawaroh, A., & Maulia, S. T. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Demokrasi Generasi Milenial. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 2.

- Latifah, K. N., & Najicha, F. U. (2022). Implikasi Media Sosial terhadap Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 494–501.
- Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. (2018). Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Pendidikan. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.30659/jpai.1.1.57-68>
- Nuraeni, Lupki, & Muhamad Jafar. (2024). Peran Media Sosial dalam Demokrasi Masa Kini. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 216–222. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.777>
- Koran Tempo. (2023). Penggunaan Internet Global capai 5,16 Milliar Orang <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/480962/pengguna-internet-global-capai-516-miliar-orang>
- Rahman, M., Nursyabilah, I., Astuti, P., Syam, M. I., Mukramin, S., & Kurnawati, W. O. I. (2023). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pembelajaran. *Journal on Education*, 5(3), 10646–10653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1890>
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional dan Implementasinya pada Sekolah Dasar. *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>
- Yusuf, F., Rahman, H., Rahmi, S., & Lismayani, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi: Pendidikan di Majelis Taklim Annur Sejahtera. *JHP2M: Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2, 1–8.